



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
JAKARTA, JANUARI 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT INVESTIGASI	
ITJEN KEMENDIKBUD	11
A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021	11
B. Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP	26
A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021.....	26
B. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi	27

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan Tahun 2021 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.

Laporan ini memuat capaian kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek dalam kurun waktu Januari s.d Desember Tahun 2021. Laporan ini terdiri dari Lampiran 1A (Piagam Penetapan Kinerja), Lampiran 1B (Penetapan Kinerja), Lampiran 2 (Formulir RKT), Lampiran 3 (Formulir Pengukuran Kinerja) dan Lampiran 4 (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari program yang telah ditetapkan, serta disajikan analisis capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

LAKIP Triwulan IV Tahun 2021 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek selama periode Januari s.d Desember Tahun 2021 dalam upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan baik pada level kebijakan maupun operasional. Selain itu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala/hambatan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek dalam Laporan kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021 serta memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait khususnya internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekaligus menjadi sumber informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

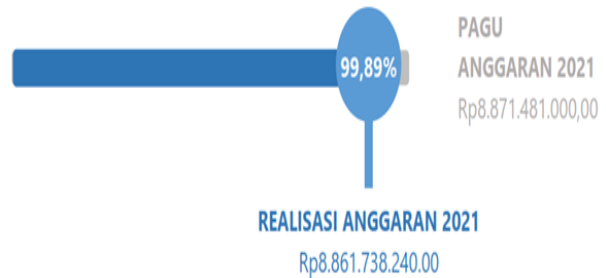
Jakarta, Januari 2022
Inspektur Investigasi,



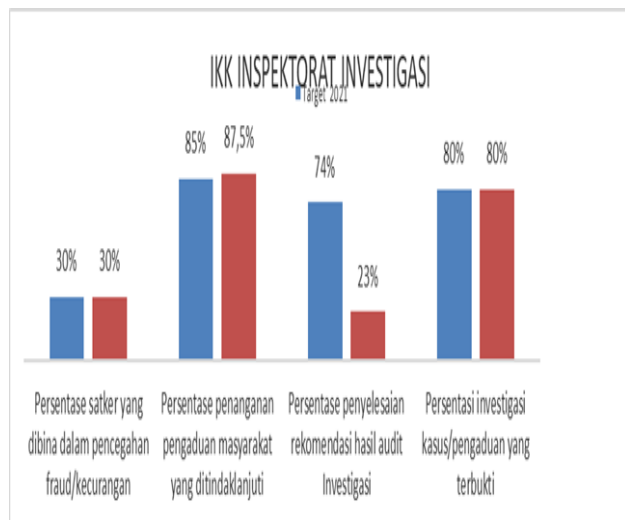
Lindung Saut Maruli Sirait
NIP. 196810191994031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.9.351.900.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), setelah terjadi efisiensi dengan disahkannya Revisi DIPA 7 POK 15 menjadi Rp.8.871.481.000,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), Sampai dengan akhir Desember 2021 secara kumulatif telah terserap sebesar Rp.8.861.738.240,00 (*Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 99.89 %.



Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap 4 (empat) IKK pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran yang terbesar adalah Permasalahan Khusus yang ditindaklanjuti melalui audit khusus, Hasil Audit Khusus yang ditindaklanjuti dan Satuan kerja yang dibina dalam program pencegahan *fraud* /kecurangan, dengan sasaran "Terciptanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi" dengan nilai capaian keuangan sebesar **99.89 %** sedangkan nilai capaian fisik sebesar **100 %**.



Terdapat pergeseran dalam pelaksanaan program, khususnya waktu pelaksanaan yang tidak sesuai atau terlambat dari jadwal yang telah ditentukan disebabkan adanya revisi anggaran dan kasus-kasus yang perlu ditangani dengan segera (Kasus prioritas). Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal diharapkan agar terus berupaya melakukan peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program, dengan cara intensifikasi koordinasi antar Inspektorat dan Bagian, sehingga pelaksanaan program dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47-60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkatkan efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah **proses integral pada tindakan dan kegiatan** yang dilakukan secara **terus menerus** oleh **pimpinan dan seluruh pegawai** untuk memberi **keyakinan memadai** atas **tercapainya tujuan organisasi** melalui **kegiatan yang efektif, keandalan** pelaporan keuangan, **pengamanan** aset negara, dan **ketaatan** terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbudristek yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikbudristek yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Permendiknas Nomor 65 Tahun 2008. Berdirinya Inspektorat Investigasi dilatarbelakangi kepedulian Kemendikbudristek atas terjadinya berbagai kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek. Disamping itu, pembentukan Inspektorat Investigasi merupakan

upaya Kemendikbudristek dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasal 231, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak September 2018 Inspektur Investigasi di pimpin oleh Drs. Bernard Purba, M.Ak kemudian sejak Oktober 2021 Inspektorat Investigasi di pimpin oleh Lindung Saut Maruli Sirait, S.E, Ak. M.Si. SDM Inspektorat Investigasi terdiri 2 (dua) pejabat struktural, 36 pejabat fungsional dan 9 (sembilan) staf dan mempunyai wilayah kerja seluruh satker maupun bidang.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek ini memuat laporan kinerja yang telah dicapai pada Triwulan IV tahun 2021, capaian kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbudristek 2020-2024.

B. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Triwulan IV tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
2. PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
4. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kemendikbud.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
Inspektorat Investigasi mempunyai :

TUGAS

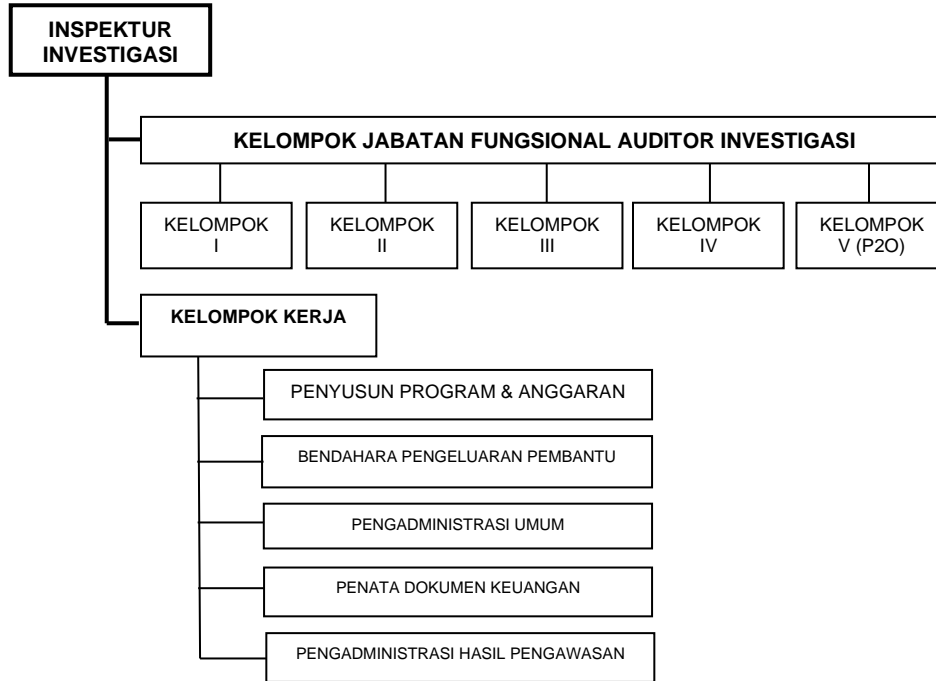
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

FUNGSI

Pasal 231 Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis audit investigasi;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat investigasi;
- c. pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
- d. pelaksanaan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan lain di lingkungan Kementerian;
- e. fasilitasi pengawasan investigasi; dan
- f. penyusunan laporan hasil audit investigasi.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi



D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

1. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbudristek yang berhubungan dengan hajat orang banyak berbasis WBS, SPAN LAPOR, Posko Pengaduan dan Pengaduan Masyarakat berbasis elektronik.
2. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek (Kampanye Membudayakan *Anti Fraud*, Fasilitasi Implementasi *Anti Fraud*, Aplikasi *Anti Fraud* dan Sinergitas dengan APH)
3. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penanganan 3 (Tiga) Dosa Besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan empat tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %
		2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	35
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	87
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	76
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80

A. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Tahun 2021. Dimana rencana kinerja tersebut merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun. Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen Kemendikbudristek.

Untuk Rencana Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2021, mengacu pada Renstra Kemendikbud 2020-2024. Inspektorat Investigasi akan berusaha untuk mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Berikut merupakan table Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program.

Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021.

Tabel 2.2: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Investigasi Tahun 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT INVESTIGASI TA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	1 Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan Pelaksanaan Pencegahan KKN (Kampanye Membudayakan Anti Fraud) (Fasilitasi Strategi Anti Fraud) Sinergisitas dengan APH	30%	2.637.278.000 702.414.000 704.509.000 1.230.355.000
	2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pelaksanaan audit investigasi dan penanganan pengaduan (Audit khusus) (Penanganan Pengaduan)	85%	5.490.592.000 4.858.418.000 632.174.000
	3 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lainnya (Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif)	74%	448.660.000 448.660.000
	4 Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti Dukungan operasional pengawasan internal (Kompilasi lha khusus) (PKS) (Gelar Kasus) (Perencanaan dan Evaluasi)	80%	719.510.000 16.000.000 30.630.000 660.600.000 12.280.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30	45	60	70
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85	87	90	90
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74	76	78	80
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80	85	88	90

B. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Inspektur Investigasi sebagai pejabat penanggungjawab program dan kegiatan, pada Tahun 2021 telah berjanji kinerja dengan Inspektur Jenderal (Irjen). Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula direncanakan dan tertuang pada RKT dengan yang diperjanjikan kinerja. Inspektorat Investigasi akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan Empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada Tahun 2021, yaitu:

1. Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan *Fraud*/kecurangan. Tahun 2021 memiliki target kinerja 30 % didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.637.278.000 pada awal Tahun 2021, adanya refocusing, PPKM dalam rangka pencegahan Covid-19 dan pengurangan kegiatan yang mengundang banyak orang maka sampai dengan akhir semester 2 bulan November Tahun 2021 membuat anggaran berkurang menjadi Rp.1.605.773.000, target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Kampanye Membudayakan Anti *Fraud* , Fasilitasi Strategi Anti *Fraud* dan Sinergisitas dengan APH.
2. Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Tahun 2021 memiliki target kinerja 85 % didukung dengan anggaran Rp4,395,989,000 pada awal Tahun 2021, kemudian adanya refocusing maka sampai dengan semester 2 bulan Desember Tahun 2021 membuat anggaran bertambah menjadi Rp5.579.089.566 , target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Audit Investigatif/*Fact Finding* dan Penanganan Pengaduan.
3. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi. Tahun 2021 memiliki target kinerja 74 % didukung dengan anggaran Rp.448.660.000 pada awal Tahun 2021, kemudian adanya perubahan kebijakan penanganan penyelesaian rekomendasi hasil Audit Investigasi sesuai hasil Rapat Inspektorat Jenderal yang dihadiri oleh seluruh Eselon 1 dan Eselon 2 pada akhir Tri Wulan 1 Tahun 2021 kegiatan ini dilimpahkan pada Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan Sekretariat Itjen Kemendikbudristek.
4. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Tahun 2021 memiliki target kinerja 80 % didukung dengan anggaran Rp719.510.000,000 pada awal Tahun 2021, adanya refocusing maka sampai dengan semester 2 bulan Desember Tahun 2021 membuat anggaran bertambah menjadi Rp1.007.712.293., target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan.

TARGET KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	1 Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30%
	2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%
	3 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74%
	4 Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) **Menguatnya mutu audit investigasi yang disertai dengan tindaklanjut dan pembinaan satuan kerja**, nilai capaian dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Inspektorat Investigasi mempunyai 4 (empat) IKK sebagai berikut:



Selama tahun 2021, terdapat perubahan baik dalam pengalokasian anggaran, maupun program kegiatan Inspektorat Investigasi. Perubahan tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan penambahan jenis kegiatan pengawasan, metode pengawasan serta hal-hal lainnya demi tercapainya sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi. Penjelasan tentang penetapan kinerja yang menginformasikan target sasaran kegiatan serta realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi selama Tahun 2021, secara lengkap tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	20	30	30	30
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	85	87.5
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	72	74	76	23
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	70	80	75	80

Tahun 2021 Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek mempunyai pagu setelah *Refocusing* sebesar **Rp.8.871.481.000**, Sampai dengan akhir Desember 2021 secara kumulatif telah terserap sebesar Rp.8.861.738.240.00 (99.89%), sehingga sisa anggaran yang masih tersedia sebesar Rp.9.742.760.00 (0.11 %).



1. **IKK pertama** dari Inspektorat Investigasi yaitu Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *Fraud/kecurangan*. Dalam IKK Pertama ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Kampanye Membudayakan Anti *Fraud*, Fasilitasi Implementasi Strategi Anti *Fraud* dan Sinergisitas dengan APH yang dilakukan secara daring, Inspektorat Investigasi pada Tahun 2021

ini secara berkelanjutan bekerjasama dengan satker baik tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota maupun Pendidikan Tinggi.

Dalam IKK Pertama ini merupakan kegiatan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek (Kampanye Membudayakan *Anti Fraud*, Fasilitasi Implementasi *Anti Fraud*, Aplikasi *Anti Fraud* dan Sinergitas dengan APH).

Target Kinerja pada tahun 2021 pada IKK pertama ini sebesar 30 % dan pencapaiannya sampai dengan Desember 2021 sebesar 30 %, pencapaian ini sesuai target karena pada kegiatan untuk pencapaian ini satker yang dibina dalam pencegahan *Fraud*/kecurangan sebanyak 70 satker Bidang Pendidikan Tinggi.

Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penanganan 3 (Tiga) Dosa Besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi

a. Kampanye Membudayakan Anti *Fraud*.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan rencana sebanyak 1 (satu) volume kegiatan dengan mengundang sebanyak 110 satker bidang pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas) yang diadakan pada bulan Oktober 2021.

b. Fasilitasi Implementasi Strategi Anti *Fraud*

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan rencana sebanyak 1 (satu) volume kegiatan dengan mengundang sebanyak 40 satker bidang pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas) yang dihadiri Rektor/Direktur dan SPI diadakan pada bulan November 2021.

c. Sinergitas Dengan APH

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) volume kegiatan dengan mengundang sebanyak 40 satker bidang pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas) yang dihadiri Rektor/Direktur dan SPI diadakan pada bulan November 2021.

IKK pertama pada akhir Triwulan IV 2021 telah menyerap dana sebesar Rp1.579.245.491 atau 99.92 % dari pagu sebesar Rp1.580.500.319,00 sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.254.828,00 atau 0.08 %.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	20	30	30	30

Target Capaian IKK Pertama ini sebesar 30%. Realisasi capaian kinerja sebesar 30,00% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 30,00%.

2. **IKK kedua** yaitu Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Dalam IKK kedua ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Audit Khusus dan Penanganan Pengaduan :

- a. **Audit Khusus**

Kegiatan audit khusus dilakukan oleh auditor Inspektorat Investigasi ketika terdapat pengaduan masyarakat, instruksi langsung dari pimpinan atau pun permohonan khusus dari satker/instansi daerah/masyarakat.

Kegiatan ini pada Tahun 2021 direncanakan sebanyak 86 frekuensi, sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 pencapaian untuk kegiatan ini sebanyak 86 frekuensi atau 100%.

- b. **Penanganan Pengaduan**

Kegiatan ini pada Tahun 2021 dilaksanakan berupa klarifikasi surat pengaduan, Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pemanggilan Permintaan Keterangan/Ahli dan Rapat Dinas (pembahasan pengaduan yang datang dari masyarakat atau permintaan audit dari Unit Utama dll). Kegiatan ini pada Tahun 2021 terlaksana Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebanyak 8 kegiatan, Rapat Dinas sebanyak 6 Kegiatan, Pemanggilan Permintaan Keterangan/Ahli sebanyak 3 Kegiatan, sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 pencapaian untuk kegiatan ini sebesar 3 Volume yang terdiri 12 Frekuensi atau 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	85	87.5

Target Capaian IKK Pertama ini sebesar 85,00%. Realisasi capaian kinerja sebesar 87,5% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 85,00%.

IKK Kedua pada akhir Triwulan IV 2021 telah menyerap dana sebesar Rp5.574.518.549,00 atau 99.92 % dari pagu sebesar Rp5.579.089.566,00 sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp4.571.017,00 atau 0.08 %.

3. **IKK ketiga** yaitu Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi. Dalam IKK ketiga ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus.

kegiatan Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus., kegiatan ini pada awal Triwulan 3 Tahun 2021 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal dan para eselon lainnya pada akhir Triwulan I Tahun 2021, sesuai informasi yang disampaikan oleh Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek pada bulan November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi dengan hasil dari 52 rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2020, 12 Rekomendasi telah terselesaikan (23%) di tindak lanjuti sisanya masih dalam proses dan akan di lakukan pemantauan lebih lanjut

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	72	74	76	23

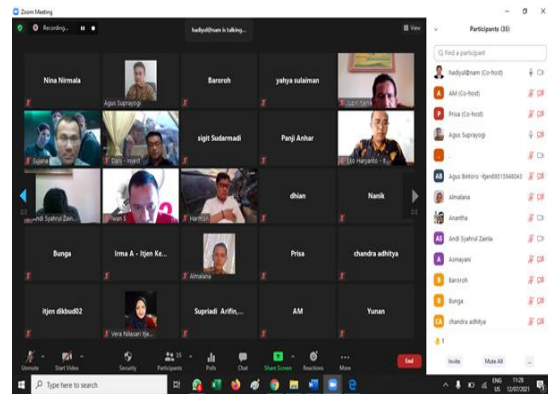
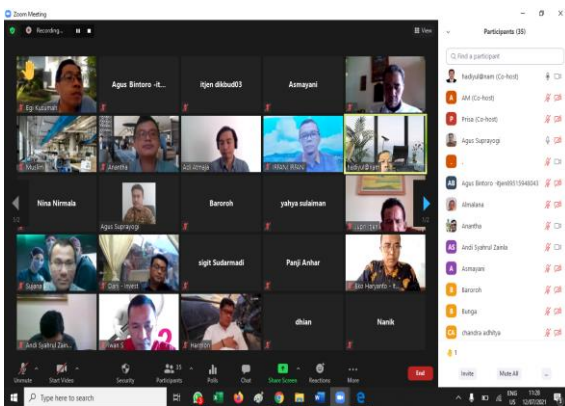
3. IKK keempat yaitu Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Dalam IKK keempat ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Evaluasi Kegiatan.

a. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dari 12 (dua belas) kali yang direncanakan kegiatan dengan rincian:

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH ORANG TERLIBAT
1	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	05/07/2021	40 Orang
2	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	06/07/2021	40 Orang
3	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	08/07/2021	40 Orang
4	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	12/07/2021	40 Orang
5	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	13/07/2021	40 Orang
6	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	15/07/2021	40 Orang
7	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	16/07/2021	40 Orang
8	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	14/07/2021	40 Orang
9	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	21/07/2021	40 Orang
10	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	23/07/2021	40 Orang
11	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	22/07/2021	40 Orang
12	Pelatihan Kantor Sendiri	Daring dengan Zoom Meeting	27/07/2021	40 Orang
				480 Orang

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.5.600.000,00 (100%), pagu anggaran sebesar Rp5.600.000.00.



b. Gelar Kasus

Kegiatan Gelar Kasus Atas Hasil Audit telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan kegiatan Fullday.

Tujuan kegiatan gelar kasus ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas audit, mengingat kualitas audit tidak ditentukan oleh hasil tetapi oleh proses. Disamping itu, guna memperoleh masukan-masukan konstruktif atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan dan rekomendasi atas hasil audit tersebut. Sedangkan yang dijadikan materi pada kegiatan gelar kasus ini adalah kasus-kasus yang telah dilakukan audit khusus sebelumnya dengan metode presentasi dan diskusi (tanya jawab) antar auditor di Inspektorat Investigasi, dilaksanakan pada :

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH ORANG TERLIBAT
1	Fullday Gelar Kasus	Hotel Century Jakarta	7 s.d 9 April 2021	50 Orang
2	Fullday Gelar Kasus	Hotel Century Jakarta	12 s.d 14 April 2021	50 Orang
3	Fullday Gelar Kasus	Hotel Century Jakarta	7 s.d 11 Mei 2021	50 Orang
4	Fullday Gelar Kasus	Hotel Mercure Jakarta	7 s.d 10 September 2021	50 Orang
5	Fullday Gelar Kasus	BW The Hive Jakarta	29 Nov s.d 1 Desember 2021	50 Orang
Jumlah				250 Orang

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.630.697.800,00 (100%), sehingga masih dari pagu anggaran sebesar Rp.630.697.800.00.



c. Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus

Kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif hingga Desember 2021 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Diikuti sebanyak 100 orang dan diselenggarakan Fullday Provinsi DKI Jakarta dan Fullboard Provinsi Jawa Barat.

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH ORANG TERLIBAT
1	Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus	Fullboard Meeting Kota Bogor	14 s.d 16 Oktober 2021	55 orang
2	Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus	Fullday Meeting DKI Jakarta	23 s.d 24 Desember 2021	55 orang
Jumlah				110 orang

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.223.299.500,00 (99.98%), sehingga masih dari pagu anggaran sebesar Rp.223.334.493.00.

d. Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat Investigasi

Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Program Inspektorat Investigasi hingga Desember 2021 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Diikuti sebanyak 100 orang dan diselenggarakan Fullday Provinsi DKI Jakarta dan Fullboard Provinsi Jawa Barat.

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH ORANG TERLIBAT
1	Kompilasi evaluasi dan perencanaan program	Fullboard Meeting Kota Bogor	20 s.d 22 Desember 2021	55 orang
Jumlah				55 orang

Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp.148.080.000,00 (100%), sehingga masih dari pagu anggaran sebesar Rp.148.080.000.00.

Target IKK Keempat pada tahun 2021 sebesar 100% pencapaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	70	80	75	80

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini dapat dilihat Rencana dan Realisasi daya serap anggaran secara rinci per kegiatan dari Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbud tahun anggaran 2021.

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran, diperoleh nilai pencapaian sasaran dengan indikator "Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan frud/kecurangan", "Presentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti", "Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi " dan "Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti " dengan nilai capaian keuangan sebesar **99.89%** sedangkan nilai capaian fisik sebesar **100%**. Nilai capaian perhitungan ini termasuk Piagam Kinerja Koordinator TU Inspektorat Investigasi.



Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.**9.351.900.000.00** setelah terjadi efisiensi dengan disahkannya Revisi DIPA 7 POK 15 Tahun 2021 menjadi **Rp.8.871.481.000,00** Sampai dengan akhir Desember 2021 secara kumulatif telah terserap sebesar Rp.8.861.738.240.00 (99.89%), sehingga sisa anggaran yang masih tersedia sebesar Rp.9.742.760.00 (0.11 %).

Pada Tahun 2021 terdapat 3 kali *Refocusing* Anggaran di Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek dengan total Rp.480.419.000,00, dengan rincian pada bulan **Juli 2021** *refocusing* sebesar Rp100.419.000, untuk penanganan Covid-19, pada bulan **Agustus 2021** *refocusing* sebesar Rp200.000.000 untuk pelaksanaan PPKM, dan pada bulan **Oktober 2021** *refocusing* sebesar Rp.100.000.000 untuk penambahan biaya kuota internet dalam rangka BDR pencegahan Covid-19.

Tabel 3.1 Daya serap anggaran Inspektorat Investigasi Triwulan IV tahun 2021

**Daya Serap Inspektorat Investigasi Itjen Kemdikbud
s.d Desember 2021**

No.	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Persentase	Sisa (3-4)	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	-	-		-	
2	Belanja Modal	-	-		-	
3	Belanja Barang Jasa	8.871.481.000	8.861.738.240	99,89%	9.742.760	0,11%
4	Belanja Bansos	.				
	TOTAL	8.871.481.000	8.861.738.240	99,89%	9.742.760	0,11%

Tabel 3.2: Rencana dan Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO
	PENGUATAN AUDIT INVESTIGASI	8.871.481.000	8.861.738.240	9.742.760
I	Pelaksanaan Audit	6.438.721.859	6.434.115.849	4.606.010
	Audit Investigasi / Fact Finding	5.143.966.087	5.141.430.416	2.535.671
	Penanganan Pengaduan	435.123.479	433.088.133	2.035.346
	Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif	223.334.493	223.299.500	34.993
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	5.600.000	5.600.000	0
	Gelar Kasus/Ekspose	630.697.800	630.697.800	0
III	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	1.580.500.319	1.579.245.491	1.254.828
	Kampanye Membudayakan Anti Fraud	382.608.000	382.560.000	48.000
	Fasilitasi Strategi Anti Fraud	386.225.319	385.449.819	775.500
	Sinergitas dengan APH	811.667.000	811.235.672	431.328
III	Dukungan Operasional Pengawasan Internal	852.258.822	848.376.900	3.881.922
	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran	148.080.000	148.080.000	0
	Ketatausahaan Inspektorat Investigasi	704.178.822	700.296.900	3.881.922

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Audit Investigasi, nilai capaian dari masing- masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3: Nilai Capaian Kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keuangan
I	Audit Investigasi / Fact Finding	100,00%	99,95%
	Penanganan Pengaduan	100,00%	99,53%
	Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif	100,00%	99,98%
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	100,00%	100,00%
	Gelar Kasus/Ekspose	100,00%	100,00%
III	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	100,00%	99,92%
	Kampanye Membudayakan Anti Fraud	100,00%	99,99%
	Fasilitasi Strategi Anti Fraud	100,00%	99,80%
	Sinergitas dengan APH	100,00%	99,95%
III	Dukungan Operasional Pengawasan Internal	100,00%	99,54%
	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran	100,00%	100,00%
	Ketatausahaan Inspektorat Investigasi	100,00%	99,45%

Tabel 3.4: Analisis Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30%	1.580.500.319	30%	1.579.245.491
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	5.579.089.566	85%	5.579.089.566
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74%	0	23%	0
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80%	1.007.712.293	80%	1.007.712.293

1. IKK pertama yaitu Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *Fraud/kecurangan*. Dalam IKK Pertama ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Kampanye Membudayakan Anti *Fraud* dan Fasilitasi Implementasi Strategi Anti *Fraud* yang dilakukan secara daring, Target pada tahun 2021 pada IKK pertama ini sebesar 30 % dan pencapaiannya sampai dengan Desember 2021 sebesar 30 %, pencapaian ini sesuai target karena pada kegiatan untuk pencapaian ini satker yang dibina dalam pencegahan *Fraud/kecurangan* sebanyak 70 satker bidang Pendidikan Tinggi.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	20	30	30	30

2. IKK kedua yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Dalam IKK kedua ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Audit Khusus dan Penanganan Pengaduan. Target pada tahun 2021 pada IKK Kedua ini sebesar 85 % dan pencapaiannya sampai dengan Desember 2021 sebesar 87.5% pencapaian ini melebihi target karena pelaksanaan Audit Khusus dari Target 83 Frekuensi tercapai 86 Frekuensi.

Penanganan Pengaduan pada tahun 2021 dilakukan melalui klarifikasi surat pengaduan, Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pemanggilan Permintaan Keterangan/Ahli dan Rapat Dinas (pembahasan pengaduan yang datang dari masyarakat atau permintaan audit dari Unit Utama dll). Kegiatan ini pada Tahun 2021 terlaksana Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebanyak 8 kegiatan, Rapat Dinas sebanyak 6 Kegiatan, Pemanggilan Permintaan Keterangan/Ahli sebanyak 3 Kegiatan, sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 pencapaian untuk kegiatan ini sebesar 3 Volume yang terdiri 12 Frekuensi atau 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	85	87.5

3. IKK Ketiga yaitu Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi. Dalam IKK ketiga ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus., kegiatan ini pada awal Triwulan 3 Tahun 2021 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal dan para eselon lainnya pada akhir Triwulan I Tahun 2021, sesuai informasi yang disampaikan oleh Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek pada bulan November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi dengan hasil dari 52 rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2020, 12 Rekomendasi telah terselesaikan (23%) di tindak lanjuti sisanya masih dalam proses dan akan di lakukan pemantauan lebih lanjut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	72	74	76	23

- 4. IKK Keempat** yaitu Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. Dalam IKK Keempat ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian yaitu Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus, PKS, Gelar Kasus dan Evaluasi Kegiatan. Target IKK Keempat pada tahun 2021 sebesar 100% pencapaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %		REALISASI %	
		2020	2021	2020	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	70	80	75	80

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2021, Inspektorat Investigasi telah menunjukkan kinerja yang baik karena dapat memenuhi:

1. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dengan tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%, berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.
2. Capaian IKK dst

Capaian IKK pertama sebesar 30 % sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 telah tercapai sebesar 30 %, IKK Kedua ini sebesar 85 % dan pencapaiannya sampai dengan Desember 2021 sebesar 87.5%, IKK ketiga ini kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan capaian ini yaitu Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif dan Kompilasi Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus., kegiatan ini pada awal Triwulan 3 Tahun 2021 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal dan para eselon lainnya pada akhir Triwulan I Tahun 2021, sesuai informasi yang disampaikan oleh Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek pada bulan November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi dengan hasil dari 52 rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2020, 12 Rekomendasi telah terselesaikan (23%) di tindak lanjuti sisanya masih dalam proses dan akan di lakukan pemantauan lebih lanjut dan IKK Keempat pada tahun 2021 sebesar 100% pencapaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET %	REALISASI %
		2021	2021
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30	30
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85	87.5
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74	23
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80	80

B. Kendala, Hambatan, dan Pemecahannya

1. Adanya refocusing anggaran tahun 2021 karena adanya pandemi Covid 19, membuat penjadwalan ulang kegiatan.
2. Adanya perubahan pagu anggaran dan revisi anggaran yang sangat dinamis.
3. Kegiatan Kampanye membudayakan anti *Fraud*, Fasilitasi Implementasi Strategi Anti *Fraud* dan Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus teknis pelaksanaannya dirubah karena dalam rangka pencegahan pandemi Covid 19.
4. Adanya pembiayaan yang belum dapat terakomodir dalam anggaran di tahun 2021 seperti jasa konsultasi atas perhitungan kerugian negara atas bangunan sekolah.
5. Pemanfaatan IT dalam proses audit dan kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti *Fraud* yang belum dikuasai oleh sebagian auditor.

C. Cara Mengatasi

Untuk mengatasi terkait adanya kendala tersebut maka inspektorat investigasi melakukan:

1. Melakukan refocusing anggaran tahun 2021 sesuai arahan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merevisi jadwal kegiatan.
2. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi.
3. Merubah kegiatan secara daring dengan mengedepankan penyampaian substansi yang komprehensif kepada peserta.
4. Menganggarkan biaya jasa konsultasi untuk perhitungan kerugian negara oleh orang yang berkompeten dibidangnya.

5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemanfaatan hasil pelaksanaan program untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan program.
6. Melakukan pengenalan dan penggunaan secara berkelanjutan terkait IT untuk kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti *Fraud*.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek. Selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kemendikbud dan pihak-pihak terkait untuk dapat dipergunakan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Inspektorat Investigasi adalah mengintensifkan sumber daya auditor yang ada serta melakukan koordinasi dengan Inspektorat I s.d IV. Serta mengoptimalkan mekanisme kerja dalam penugasan auditor untuk tidak terjadinya penugasaan ganda.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek tahun 2021 ini disusun. Harapan kami, laporan ini dapat dijadikan bahan masukan/kajian/telaahan. Khususnya mengenai akuntabilitas kinerja bagi pimpinan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan di masa mendatang dan terutama dalam perbaikan kinerja Tahun 2021.

Tabel Nilai Capaian Kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan	Realisasi	
		Fisik	Keuangan
I	Audit Investigasi / Fact Finding	100,00%	99,95%
	Penanganan Pengaduan	100,00%	99,53%
	Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif	100,00%	99,98%
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	100,00%	100,00%
	Gelar Kasus/Ekspose	100,00%	100,00%
III	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	100,00%	99,92%
	Kampanye Membudayakan Anti Fraud	100,00%	99,99%
	Fasilitasi Strategi Anti Fraud	100,00%	99,80%
	Sinergitas dengan APH	100,00%	99,95%
III	Dukungan Operasional Pengawasan Internal	100,00%	99,54%
	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran	100,00%	100,00%
	Ketatausahaan Inspektorat Investigasi	100,00%	99,45%

Tabel Analisis Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi	
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30%	1.580.500.319	30%	1.579.245.491
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	5.579.089.566	85%	5.579.089.566
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74%	0	23%	0
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80%	1.007.712.293	80%	1.007.712.293



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bernard Purba

Jabatan : Inspektur Investigasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 11 Februari 2021

Inspektur Jenderal

Inspektur Investigasi



Chatarina Muliana



Bernard Purba

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85
		[IKK 1.3] Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74
		[IKK 1.4] Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 9.351.900.000
		TOTAL	Rp. 9.351.900.000

Jakarta, 11 Februari 2021

Inspektur Jenderal

Inspektur Investigasi



Chatarina Muliana



Bernard Purba



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lindung Saut Maruli Sirait

Jabatan : Inspektur Investigasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 November 2021

Inspektur Jenderal

Inspektur Investigasi

Chatarina Muliana

Lindung Saut Maruli Sirait

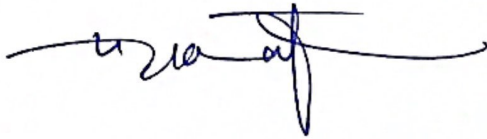
Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85
		[IKK 1.3] Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74
		[IKK 1.4] Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 8.871.481.000
		TOTAL	Rp. 8.871.481.000

Jakarta, 30 November 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur Investigasi



Lindung Saut Maruli Sirait

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT INVESTIGASI TA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	1 Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan Pelaksanaan Pencegahan KKN (Kampanye Membudayakan Anti Fraud) (Fasilitasi Strategi Anti Fraud) Sinergisitas dengan APH	30%	2.637.278.000 702.414.000 704.509.000 1.230.355.000
	2 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pelaksanaan audit investigasi dan penanganan pengaduan (Audit khusus) (Penanganan Pengaduan)	85%	5.490.592.000 4.858.418.000 632.174.000
	3 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lainnya (Fasilitasi Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus/Investigatif)	74%	448.660.000 448.660.000
	4 Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti Dukungan operasional pengawasan internal (Kompilasi lha khusus) (PKS) (Gelar Kasus) (Perencanaan dan Evaluasi)	80%	719.510.000 16.000.000 30.630.000 660.600.000 12.280.000



**Rencana Aksi
INSPEKTORAT INVESTIGASI
Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30	0	5	15	30
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85	20	45	65	85
		[IKK 1.3] Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74	0	0	0	74
		[IKK 1.4] Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80	0	10	40	80

Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	81	Layanan	33	50	68	81	Rp. 9.351.900.000
2	[051] Pelaksanaan Audit	71	Lap	30	45	60	71	Rp. 5.506.592.000
3	[052] Pelaksanaan Pemantauan	2	Lap	0	1	1	2	Rp. 1.139.890.000
4	[053] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	3	Lap	0	1	3	3	Rp. 2.637.278.000
5	[054] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	5	Lap	3	3	4	5	Rp. 68.140.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 9.351.900.000

Jakarta, 23 April 2021

Inspektur Investigasi



Bernard Purba

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30%	30%	1.580.500.319	1.579.245.491	99,92%
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	87,5%	5.579.089.566	5.574.518.549	99,92%
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74%	23%	0	0	0,00%
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80%	80%	1.007.712.293	1.007.677.300	100,00%



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
INSPEKTORAT INVESTIGASI
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[[IKK 1.1] Persentase Satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	%	30	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 30	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 10 TW4 : 30	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan ini terdiri dari Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan APH, sampai saat ini masih dalam pembuatan instrumen dan penelaahan sasaran satker yang akan dikunjungi, kegiatan ini terjadwal pada triwulan 3 tahun 2021 Kendala / Permasalahan : pengertian tentang apa itu fraud, bagaimana itu fraud dan penerapannya dalam pelaksanaan kegiatan. adanya PPKM di banyak daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID 19 Strategi / Tindak Lanjut : membuat paparan dan modul-modul yang mudah di pahami dalam memahami fraud dan pelaksanaannya dan diberikan bimbingan oleh narasumber dari Inspektorat Investigasi. Memungkinkan akan digelar secara daring sesuai situasi dan kondisi</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kegiatan ini terdiri dari Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan APH, sampai saat ini masih dalam pembuatan instrumen dan penelaahan sasaran satker yang akan dikunjungi, kegiatan ini terjadwal pada triwulan 3 tahun 2021 Kendala / Permasalahan : adanya PPKM 2021 di banyak daerah dikarenakan pandemi yang mengalami peningkatan serta dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID 19 Strategi / Tindak Lanjut : membuat paparan dan modul-modul yang mudah di pahami dalam memahami fraud dan pelaksanaannya dan diberikan bimbingan oleh narasumber dari Inspektorat Investigasi. Memungkinkan akan digelar secara daring sesuai situasi dan kondisi</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan ini terdiri dari Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan APH, perkembangan sampai saat ini untuk kegiatan Sinergitas dengan APH telah terlaksana secara daring dengan melibatkan narasumber dari Polda Metro Jaya, Kemen PPPA, BNPT dan Yayasan Pulih yang mengambil tema Sinergitas Penanganan Kekerasan Seksual, Bullying dan Intoleransi di Satuan Pendidikan kemudian kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Strategi Anti Fraud dalam pembuatan instrumen dan penelaahan sasaran satker yang akan dikunjungi, kegiatan ini terjadwal pada bulan Oktober triwulan IV tahun 2021 Kendala / Permasalahan : Perubahan metode kegiatan dari Luring menjadi Daring Strategi / Tindak Lanjut : membuat paparan dan modul-modul yang mudah di pahami dalam memahami fraud dan pelaksanaannya dan diberikan bimbingan oleh narasumber dari Inspektorat Investigasi. digelar secara daring sesuai situasi dan kondisi</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : egiatan ini terdiri dari Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan APH, perkembangan sampai saat ini untuk kegiatan Sinergitas dengan APH telah terlaksana secara daring dengan melibatkan narasumber dari Polda Metro Jaya, Kemen PPPA, BNPT dan Yayasan Pulih yang mengambil tema Sinergitas Penanganan Kekerasan Seksual, Bullying dan Intoleransi di Satuan Pendidikan kemudian kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Strategi Anti Fraud dalam pembuatan instrumen dan penelaahan sasaran satker yang akan dikunjungi, kegiatan ini terlaksana pada bulan Oktober dan November tahun 2021 Kendala / Permasalahan : Perubahan metode kegiatan dari Luring menjadi Daring Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud, Fasilitasi Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan APH, Sinergitas dengan APH telah terlaksana secara daring dengan melibatkan peserta dari Unit dan Instansi terkait</p>
---	--	--	---	----	---	--	--

2	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 85	TW1 : 35 TW2 : 58 TW3 : 82 TW4 : 87.5	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 1 2021 telah terlaksana sebanyak 27 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 2 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa pemanggilan saksi oleh APH Kendala / Permasalahan : Terjadi pergeseran jadwal dikarenakan adanya refocusing anggaran 2021 Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 2 berikutnya</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 2 2021 telah terlaksana sebanyak 52 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 4 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa pemanggilan saksi oleh APH Kendala / Permasalahan : Terjadi pergeseran jadwal dikarenakan adanya PPKM 2021 pada akhir Bulan Juni 2021 sehingga program Audit Khusus yang sudah direncanakan belum terlaksana Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal yang telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 3 berikutnya, serta mempertimbangkan pencegahan Covid 19 dan dalam penugasan juga selalu ditekankan 5M sesuai Protokol Kesehatan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 3 2021 telah terlaksana sebanyak 84 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 6 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa pemanggilan saksi oleh APH Kendala / Permasalahan : adanya PPKM 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 membuat program Audit Khusus dan penanganan pengaduan yang sudah direncanakan di undur melihat situasi daerah yang akan dituju Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal yang telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 4 berikutnya, serta mempertimbangkan pencegahan Covid 19 dan dalam penugasan juga selalu ditekankan 5M sesuai Protokol Kesehatan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 4 2021 telah terlaksana sebanyak 84 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 6 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa pemanggilan saksi oleh APH. s.d Desember 2021 terdapat 507 pengaduan/permintaan, kemudian ditelaah dan yang layak untuk diaudit investigasi sebanyak 112, dan s.d Desember sudah ditindaklanjuti sebanyak 98 pengaduan atau sekitar 87,5% Kendala / Permasalahan : adanya PPKM 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 membuat program Audit investigasi dan penanganan pengaduan yang sudah direncanakan dilihat urgensi nya untuk dilakukan audit investigasi Strategi / Tindak Lanjut : penugasan audit investigasi mempertimbangkan pencegahan Covid 19 dan dalam penugasan juga selalu ditekankan 5M sesuai Protokol Kesehatan</p>
---	--	---	---	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.3] Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	%	74	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 74	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 23	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi yang belum terlaksana pada Triwulan I Kendala / Permasalahan : Ketidakterlaksanaan kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yaitu pemindahan pelaksanaan dari Inspektorat Investigasi kepada Bagaian PLP Itjen Kemendikbud Strategi / Tindak Lanjut : Telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Bagian PLP terkait pemindahan pelaksanaan kegiatan ini</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi, kegiatan ini pada awal Triwulan 2 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal Kendala / Permasalahan : Ketidakterlaksanaan kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yaitu pemindahan pelaksanaan dari Inspektorat Investigasi kepada Bagaian PLP Itjen Kemendikbud Strategi / Tindak Lanjut : Telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Bagian PLP terkait pemindahan pelaksanaan kegiatan ini dan akan dilaksanakan secepatnya dengan menimbang adanya PPKM 2021 dan penanganan serta pencegahan COVID 19</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi, kegiatan ini pada awal Triwulan 3 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal Kendala / Permasalahan : Ketidakterlaksanaan kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yaitu pemindahan pelaksanaan dari Inspektorat Investigasi kepada Bagaian PLP Itjen Kemendikbud Strategi / Tindak Lanjut : Telah dilakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Bagian PLP terkait pemindahan pelaksanaan kegiatan ini dan akan dilaksanakan secepatnya dengan menimbang adanya PPKM 2021 dan penanganan serta pencegahan COVID 19</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi, kegiatan ini pada awal Triwulan 3 telah dilimpahkan ke Bagian PLP Itjen Kemendikbudristek sesuai hasil Rapat dengan Inspektur Jenderal dan para eselon lainnya, sesuai informasi yang disampaikan oleh Bagian PLP pada bulan November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi dengan hasil dari 52 rekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2020, 12 Rekomendasi telah terselesaikan di tindak lanjuti kemudian sisa yang belum di tindak lanjuti masih dalam proses dan akan di lakukan pemantauan lebih lanjut Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Bagian PLP dirasa belum optimal dikarenakan adanya perubahan kegiatan yaitu pemindahan pelaksanaan dari Inspektorat Investigasi kepada Bagaian PLP Itjen Kemendikbud Strategi / Tindak Lanjut : melakukan koordinasi secara intensif mengenai pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit investigasi antara Bagian PLP dan Inspektorat Investigasi</p>
---	--	---	---	----	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.4] Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	%	80	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 80	TW1 : 0 TW2 : 30 TW3 : 55 TW4 : 80	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi LHA, PKS dan Gelar Kasus sampai pada TW 1 belum ada kegiatan yang dilaksanakan, sampai saat ini masih dalam pembuatan instrumen kompilasi, penyusunan tema kegiatan PKS dan Pembuatan Jadwal Kegiatan Gelar Kasus yang sesuai dengan LHA yang sudah selesai</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif, Gelar Kasus dan PKS yang belum terlaksana karena adanya pergeseran jadwal kegiatan Audit Khusus</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 2 berikutnya</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi LHA, PKS dan Gelar Kasus sampai pada TW 2 telah dilaksanakan 1 kegiatan PKS, 3 Gelar Kasus dan sampai saat ini masih dalam pembuatan instrumen kompilasi audit khusus</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif, Gelar Kasus dan PKS sudah terlaksana namun belum maksimal karena adanya pergeseran jadwal kegiatan Audit Khusus dan adanya PPKM 2021 serta Penanganan dan Pencegahan COVID 19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 3 serta mengoptimalkan penggunaan daring untuk terpenuhinya keterlaksanaan program kegiatan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi LHA, PKS dan Gelar Kasus sampai pada TW 3 telah dilaksanakan 6 kegiatan PKS, 4 Gelar Kasus dan sampai saat ini masih dalam pembuatan instrumen kompilasi audit khusus yang akan dilaksanakan pada TW 4</p> <p>Kendala / Permasalahan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi Laporan Hasil Audit Khusus/Investigatif, Gelar Kasus dan PKS sudah terlaksana namun belum maksimal karena adanya pergeseran jadwal kegiatan Audit Khusus dan adanya PPKM 2021 serta Penanganan dan Pencegahan COVID 19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 3 serta mengoptimalkan penggunaan daring untuk terpenuhinya keterlaksanaan program kegiatan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Dalam IKK ini terdapat kegiatan Kompilasi LHA, PKS dan Gelar Kasus sampai pada TW 4 telah dilaksanakan 6 kegiatan PKS, 12 Gelar Kasus, kompilasi audit khusus yang telah dilaksanakan pada TW 4</p> <p>Kendala / Permasalahan : adanya PPKM 2021 serta Penanganan dan Pencegahan COVID 19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Pergeseran jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang telah terlaksana di Triwulan 4 serta mengoptimalkan penggunaan daring dan melaksanakan kegiatan sesuai protokol kesehatan untuk terpenuhinya keterlaksanaan program kegiatan</p>
---	--	--	---	----	---	---	--

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	71	Layanan	27	49	66	95	Rp. 8.871.481.000
2	[051] Pelaksanaan Audit			27	47	58	87	Rp. 6.438.722.000
3	[053] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya			0	0	1	3	Rp. 1.580.500.000
4	[054] Dukungan Operasional Pengawasan Internal			1	3	4	5	Rp. 852.259.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 8.871.481.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta, 26 Januari 2022

Inspektur Investigasi



Lindung Saut Maruli Sirait